

**PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DI KANTOR
PERTANAHAN KOTAMADYA MOJOKERTO
PROPINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan



OLEH :

**SITI CHOTIDJAH
NIM. 9761280**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTISARI

Tugas Badan Pertanahan Nasional bermuara pada pelayanan masyarakat yang jenis, dimensi dan volume beban kerja terdapat keanekaragaman. Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan ilmu manajemen. Sejauh mana penerapan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan dan bagaimana dukungan yang diberikan oleh unsur manajemen dalam pelaksanaan tugas serta sejauh mana hasil kegiatan ditinjau dari penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut perlu diadakan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah "metode evaluatif" yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto dan perkembangan hasil kegiatannya. Responden pada penelitian ini adalah para pemimpin di Kantor Kotamadya Mojokerto dan seluruh karyawan dan karyawan. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, studi dokumen dan observasi langsung, dengan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Terhadap data penerapan fungsi-fungsi manajemen dan dukungan yang diberikan oleh unsur manajemen terhadap pelaksanaan tugas terlebih dahulu dilakukan skor terhadap jawaban kuesioner tertutup, untuk selanjutnya diklasifikasikan untuk penarikan kesimpulan. Terhadap data sekunder berupa hasil pelaksanaan kegiatan disajikan dalam bentuk tabel untuk selanjutnya diinterpretasikan.

Dari penelitian mengenai penerapan fungsi manajemen di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto, berdasarkan fakta, data dan keadaan yang ada, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Manajemen Pertanahan di Kantor Kotamadya Mojokerto ditinjau dari penerapan fungsi-fungsi Manajemen, berjalan baik, terbukti dari pengolahan data primer dari lima penerapan fungsi manajemen masing masing memperoleh skor total 849, 819, 758, 762 dan 678 yang berdasarkan klasifikasi berada dalam kategori baik.
2. Dukungan unsur manajemen dalam pelaksanaan tugas berjalan dengan baik yang memperoleh skor sebesar 1402, yang berdasarkan klasifikasi berada dalam kategori baik.
3. Kegiatan-kegiatan sebagian besar dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya sarana dan sumber daya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBARAN MOTO.....	iv
LEMBARAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Lokasi Penelitian.....	10
2. Populasi	10
1. Jenis dan sumber Data.....	10
2. Teknik Pengumpulan Data.....	11
3. Teknik Analisis Data.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka.....	14
1. Fungsi Manajemen.....	16

	C. Anggapan Dasar.....	27
	D. Batasan Operasional	27
BAB III	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
	A. Tinjauan Umum Kotamadya Mojokerto.....	28
	B. Tinjauan Umum Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto.....	31
BAB IV	HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Manajemen Pertanahan dan unsur Manajemen.....	34
	1. Penerapan Fungsi Perencanaan	36
	2. Penerapan Fungsi Pengorganisasian.....	38
	3. Penerapan Fungsi Pemberian Perintah	39
	4. Penerapan Fungsi Pengkoordinasian.....	41
	5. Penerapan Fungsi Pengawasan.....	43
	6. Dukungan Unsur Manajemen Terhadap Pelaksanaan Tugas.....	44
	B. Pelaksanaan Kegiatan.....	47
	1. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah.....	47
	2. Seksi Penatagunaan Tanah.....	49
	3. Seksi Hak-Hak Atas Tanah.....	51
	4. Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah.....	52
	5. Sub Bagian Tata Usaha.....	59
BAB V	Penutup	
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam bidang pertanahan adalah adanya keterbatasan keberadaan tanah dibandingkan dengan kebutuhan akan tanah itu sendiri. Permasalahan tersebut, saat ini sudah semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kebijakan Nasional di bidang pertanahan telah digariskan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA pada dasarnya termuat penjabaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai sumber daya alam pada umumnya, sebagaimana telah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan landasan utama bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasionalnya. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, kebijaksanaan nasional di bidang pertanahan dikembangkan berdasarkan pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat “

Secara umum, kebijaksanaan di bidang pertanahan hingga tanggal 24 September 1960 masih memberlakukan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan

unifikasi hukum pertanahan nasional yang berdasarkan hukum adat. Hal ini tercermin dalam penjelasan umum angka I, sebagai berikut :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Kemudian dalam UUPA, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (3)

disebutkan :

“ wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat, dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan adanya perumusan kebijaksanaan dan strategi pertanahan yang konseptual dan terpadu. Lembaga yang bertanggung jawab seperti yang tertuang dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1988 adalah Badan Pertanahan Nasional.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 khususnya pasal 2, disebutkan bahwa :

Badan Pertanahan Nasional bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan

pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Berdasarkan keputusan presiden tersebut, kemudian dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/1988 dan Nomor 1/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional. Dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1/1989, dapat diketahui bahwa tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional, yang mana Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan di bidang pertanahan meliputi pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah yang merupakan satu kesatuan fungsi yang utuh menyeluruh dan tidak dapat dipisah – pisahkan satu sama lain.

Di tingkat daerah tugas agraria khususnya di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yang diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi, dan

Berdasarkan susunan organisasi, Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pengaturan Penguasaan tanah
3. Seksi Penatagunaan Tanah
4. Seksi Hak-Hak Atas Tanah
5. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah

Adanya tuntutan pembangunan dan tuntutan peningkatan kesejahteraan manusia, mengharuskan dilakukannya pengaturan tentang pengelolaan tanah dengan cara yang sebaik-baiknya dan pengembangan administrasi pertanahan perlu dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat mengakomodasikan dan mengkoordinasikan semua kepentingan akan tanah secara serasi, selaras dan seimbang dan lestari.

Untuk dapat memberikan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat, dan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, maka mutlak diperlukan adanya penerapan ilmu manajemen. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar, tertib dan terarah sehingga tujuan pengelolaan dan pengurusan tanah dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Penerapan ilmu manajemen tersebut, selain diperlukan untuk pelaksanaan

sehingga Badan Pertanahan Nasional dapat memenuhi tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat dan berkembang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari adanya kenyataan bahwa masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan Badan Pertanahan Nasional akan berkembang menjadi masyarakat modern, yang membutuhkan manajemen dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Hal ini seperti dikemukakan oleh Y.M. Sunindhia dan Ninik Widiyanti dalam Metty Kawuka (1997 : 4) bahwa :

Dalam masyarakat modern dewasa ini manajemen semakin penting. Masyarakat modern adalah masyarakat yang kompleks. Manusia modern yang telah meningkat kecerdasan dan pengetahuan teknologinya, telah menempatkan rasionalitas, efektifitas dan efisiensi sebagai nilai moral yang tinggi.

Sejalan dengan itu dalam menghadapi musim kompetisi akibat globalisasi yang diwarnai dengan persaingan yang ketat, akan berpengaruh terhadap lembaga pengelola pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional, dimana urusan tanah akan menjadi urusan lintas sektoral serta kewenangan mengelola dan mengurus tanah akan ditangani oleh beberapa pihak, sehingga Badan Pertanahan Nasional harus siap dan dapat menerima tantangan dan kondisi dengan tetap meningkatkan kualitas pelayanannya dengan didukung oleh penerapan manajemen yang baik.

Menurut Y.M Sunindhia dan Ninik Widayanti dalam Metty Kawuka

(1997 : 5) bahwa dengan faktor kompetisi maka keberhasilan adanya manajemen

keniagaan. Akan tetapi pada dasarnya bagi kegiatan organisasi dalam pemerintahan pun hal yang sama berlaku pula.

Menurut Sondang P. Siagian (1996 : vi) bahwa untuk menghadapi tantangan di berbagai bidang yang sering tidak bebas dari persaingan hebat dalam rangka pencapaian tujuan, menyebabkan terjadinya tuntutan yang kuat untuk meningkatkan kemampuan manajerial oleh berbagai jenis organisasi, tanpa mempersoalkan apakah yang dikelola itu organisasi politik, organisasi niaga, organisasi pendidikan dan juga organisasi di lingkungan pemerintahan.

Kotamadya Mojokerto merupakan salah satu kota yang letaknya berbatasan dengan Ibukota Propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya. Dengan lokasi demikian maka Kotamadya Mojokerto berfungsi sebagai daerah penyanggah bagi ibukota propinsi, dimana hal tersebut akan membawa dampak bagi perkembangan Kotamadya Mojokerto. Ibukota propinsi Surabaya merupakan kota yang berperan sebagai pusat kegiatan usaha dan ekonomi, dikarenakan segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha tersebut pasti akan tersedia disini. Hal ini menyebabkan para pelaku usaha akan saling bersaing termasuk dalam hal mendapatkan tempat usaha sehingga harga tanah akan menjadi mahal dan sulit untuk diperoleh. Para pelaku usaha akan lebih memilih daerah yang berlokasi di sekitar ibukota propinsi untuk mengalihkan usahanya, apabila mereka berniat untuk mengembangkan usahanya dan tidak mendapatkan

Berdasarkan keadaan di atas, maka keberadaan Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto menjadi sangat dibutuhkan sehingga dituntut adanya kemampuan aparatnya untuk lebih meningkatkan kemampuannya termasuk kemampuan manajerialnya sehingga Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto dapat menjadi instansi yang diakui keberadaannya.

Mengingat pentingnya penerapan fungsi manajemen dalam pelaksanaan tugas-tugas pertanahan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai hal tersebut di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto, dengan judul :
“ PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MOJOKERTO PROPINSI JAWA TIMUR “.

B. Perumusan Masalah

Dengan semakin meningkatnya pembangunan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai organisasi pelaksana terdepan dalam memberikan pelayanan di bidang pertanahan dituntut untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanannya. Pelayanan bidang pertanahan pada hakekatnya adalah pelayanan fungsi-fungsi pertanahan secara utuh, meliputi pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah yang satu sama lain merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1996 : 2-3), bahwa keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuan dan berbagai sarannya sangat tergantung antara lain pada kemampuan kelompok manajerial dalam organisasi menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto ?
- b. Bagaimana dukungan unsur-unsur manajemen dalam pelaksanaan tugas di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto ?
- c. Bagaimana hasil yang telah dicapai dari penerapan fungsi-fungsi manajemen di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto ?

C. Batasan Masalah.

Mengingat luasnya permasalahan yang akan diteliti dan keterbatasan pengetahuan serta kemampuan penyusun maka dalam penelitian ini penyusun membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Penerapan fungsi-fungsi manajemen di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

2. Hasil kegiatan dari fungsi-fungsi manajemen yang diteliti adalah hasil kegiatan selama empat tahun yaitu Tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, agar diketahui perkembangan penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaan tugas di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto.
2. Untuk mengetahui dukungan unsur-unsur manajemen dalam pelaksanaan tugas Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto.
3. Untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dari penerapan fungsi-fungsi manajemen pertanahan di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Mengetahui penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaan tugas di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto.
2. Mengetahui dukungan unsur-unsur manajemen dalam pelaksanaan

3. Mengetahui peningkatan hasil yang diperoleh dari penerapan fungsi-fungsi manajemen di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode evaluatif*, dimana dengan menggunakan metode ini penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan fungsi manajemen di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto Propinsi Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa di kantor tersebut belum pernah dilakukan penelitian mengenai manajemennya.

2. Populasi

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan unit analisa yang terdiri dari karyawan dan karyawan Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto sejumlah 43 orang beserta sarana dan prasarana. Dari sejumlah 43 orang tersebut akan dibagi dua berdasarkan teknik pengumpulan datanya yaitu 6 orang dengan wawancara dan 37 orang dengan kuesioner.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya atau melalui pengamatan langsung di lapang yang diperoleh dengan jalan antara lain dari wawancara/kuisisioner, terhadap responden di lokasi penelitian. Data primer disini meliputi antara lain identitas karyawan, fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pemberian perintah, fungsi pengkoordinasian, fungsi pengawasan dan dukungan unsur manajemen terhadap pelaksanaan tugas kantor.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh antara lain dari dokumentasi, laporan dan lain-lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian. Data Sekunder disini terdiri dari keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana serta hasil-hasil kegiatan meliputi kegiatan seksi pengaturan penguasaan tanah, seksi penatagunaan tanah, seksi hak-hak atas tanah, seksi pengukuran dan pendaftaran tanah serta sub bagian tata usaha.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara disini adalah melakukan tanya jawab dengan unsur pimpinan

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung kegiatan di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto, meliputi tugas, wewenang, tanggung jawab masing-masing karyawan dan keadaan sarana dan prasarana yang ada yang digunakan sebagai data pendukung penelitian.

c. Kuisisioner

Menggunakan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden yang terdiri dari para staf karyawan di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto mengenai penerapan fungsi-fungsi manajemen dan dukungan unsur manajemen dalam pelaksanaan tugas kantor.

d. Studi Kepustakaan

Dilaksanakan melalui membaca, mempelajari referensi, buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

e. Dokumentasi

Pengambilan data dengan teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara studi dokumen yang dapat berupa arsip, laporan-laporan dan lain-lain dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Teknik Analisa Deskriptif Kualitatif* yaitu menganalisa data untuk memberikan predikat

Data/informasi yang bersifat kualitatif dapat digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan data/informasi yang bersifat kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian terlebih dahulu akan disajikan dalam bentuk tabel untuk selanjutnya diinterpretasikan untuk memecahkan masalah penelitian serta dalam rangka pengambilan keputusan dan saran. Dari tabel yang diperoleh, kemudian dilakukan skoring data terhadap pertanyaan-pertanyaan hasil kuesioner untuk memperoleh data kuantitas yang selanjutnya diadakan klasifikasi untuk memperoleh kesimpulan dengan jalan memberikan predikat kepada penerapan fungsi-fungsi manajemen dan dukungan unsur manajemen dalam pelaksanaan tugas kantor pertanahan.

Penentuan skor dilakukan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Tolak ukur ini diambil dari studi pustaka baik yang berupa buku-buku ilmiah maupun peraturan perundangan yang masih berlaku. Berdasarkan data hasil kuesioner berupa skor/nilai dengan skala bertingkat, yaitu antara 1 sampai 3, maka penyusun menetapkan klasifikasi dalam tiga kelas, yaitu 1. Baik, 2. Sedang dan 3. Kurang Baik.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai penerapan fungsi manajemen di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto, berdasarkan data, fakta dan keadaan yang ada, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan fungsi-fungsi manajemen di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto berjalan dengan baik, terbukti dari lima fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian dan pengawasan berdasarkan klasifikasi berada dalam kategori baik.
2. Dukungan unsur-unsur manajemen yang terdiri dari keuangan manusia/personil, sistem/metode serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas di Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto berdasarkan klasifikasi berada dalam kategori baik. Dengan demikian maka berdasarkan perumusan masalah dan anggapan dasar yang diajukan dan setelah dilakukan analisa data ternyata anggapan dasar yang kedua tidak terbukti.
3. Pelaksanakan tugas yang dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan kepada karyawan Kantor Pertanahan Kotamadya Mojokerto sendiri sebagian besar sudah

demikian maka berdasarkan perumusan masalah dan anggapan dasar yang diajukan dan setelah dilakukan analisa data ternyata anggapan dasar yang ketiga juga tidak terbukti.

B. Sa r a n

1. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dengan volume kegiatan pada tiap seksi, masih perlu untuk dilakukan pembagian tugas yang lebih rinci agar tidak ada lagi karyawan yang mengerjakan dua pekerjaan sekaligus.
2. Untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya penambahan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana serta tenaga operasional yang mempunyai kemampuan teknis, khususnya di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, STPN, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi (1995), Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi (1996), Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kadarman, A.M. (1994), Pengantar Ilmu Manajemen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kawuka, Metty (1998), Studi Manajemen Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sangihe Talaud Propinsi Sulawesi Utara.
- Manullang, M. (1988), Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nitisemito, Alex S. (1991), Manajemen Personalia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siagian, P. Sondang (1996), Fungsi-Fungsi Manajerial, Bumi Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, (1995), Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi (1994), Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsi, Ibnu (1994), Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen, Rineka Cipta, Jakarta.
- Terry, George. R. (1991), Prinsip-Prinsip Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta.
- Terry, G.R. dan Rue, R.W. (1991), Dasar-Dasar Manajemen, Bumi Akasara, Jakarta.
- Uchjana Effendy, Onong (1989), Human Relation dan Public Relations dalam Manajemen, Mandar Maju, Bandung.
- Widjaya, A.W. (1987), Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen, Bina Aksara, Jakarta.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan serta Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.